

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang dapat penulis berikan kepada elemen terkait perihal *collaborative governance*. Pada bab ini juga akan memaparkan kembali ada atau tidaknya *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan potensi dilakukannya *collaborative governance*.

4.1 Kesimpulan

Collaborative Governance merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan sebagai alternatif pembangunan jaringan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga elemen tersebut memiliki peran masing-masing, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perizinan, swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai penyedia sumberdaya dan pelaksana kebijakan.

Pesisir Barat sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi provinsi Lampung khususnya dari sektor pariwisata telah berkembang sedemikian rupa dari awal berdiri hingga saat ini. Dibiidang pariwisata dalam pengelolaannya pariwisata eksisting memiliki struktur yang jelas, birokrasi yang memadai, sumberdaya alam serta sumberdaya

manusia mumpuni yang menjadikan Pesisir Barat sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata oleh pemerintah provinsi. Pengelolaan tersebut meliputi kebijakan mengenai event wisata, destinasi, serta kebijakan pemerintah tentang skill masyarakat bidang pariwisata. Meskipun peraturan daerah tentang pariwisata belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah kabupaten, namun untuk struktur birokrasi dan lainnya sudah memadai.

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata eksisting elemen atau aktor yang terlibat belum seluruhnya berperan dan terlibat langsung. Aktor yang dimaksud seperti swasta dan masyarakat belum memiliki peranan yang signifikan jika merujuk pada konsep *collaborative governance* yang memerlukan keterlibatan ketiga aktor termasuk didalamnya pemerintah. Bahkan pemerintah sebagai aktor penting belum sepenuhnya fokus pada pengembangan pariwisata. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan proses perkembangan serta pengelolaan pariwisata masih terbengkalai.

Tentunya, hal yang membuat ketiga aktor yang seharusnya terlibat dalam proses pengelolaan serta pengembangan pariwisata tidak bersatu dalam tujuan yang sama dikarenakan oleh banyaknya hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dimaksud seperti keterlibatan masyarakat dalam menggali potensi wisata didaerahnya masih sangat minim yang mengakibatkan tidak terlibat dan diikuti sertakan.

Infrastruktur baik jalan maupun transportasi di daerah destinasi wisata belum memadai, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi wawasan kepada masyarakat tentang potensi wisata. Kemudian pemerintah pun gagal meyakinkan swasta untuk berinvestasi sehingga aktor utama dalam sebuah kolaborasi memang belum sepenuhnya terjun dan berkomitmen pada pengembangan pariwisata.

Tentunya hal besar memiliki resiko yang besar, namun mendesain aturan serta membuka peluang terciptanya kolaborasi yang dilakukan secara sah dan dijamin oleh UU juga merupakan langkah besar sebagai pembuka jalan menuju era baru dalam pengelolaan serta pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat yang lebih terstruktur, terjamin, dan legal serta diakui banyak pihak.

4.2 Saran

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata tentunya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun dapat menguntungkan berbagai pihak termasuk swasta atau pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar objek wisata. Meskipun demikian dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat khususnya Pulau Pisang masih kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum terlaksana.

Terkait dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat harus dapat mempertemukan swasta atau pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam forum yang sama agar tidak terciptanya persepsi simpang siur mengenai informasi yang dibutuhkan.
2. Pemerintah Daerah sudah seharusnya fokus pada pengembangan wisata unggulan salah satunya Pulau Pisang untuk memberikan investasi dari investor ke ranah pariwisata agar potensi wisata dapat dikembangkan dengan baik.
3. Swasta seharusnya melihat peluang yang ada di Pulau Pisang dengan banyaknya potensi wisata yang belum terjamah agar dapat membangun atau berinvestasi agar wisata unggulan semakin bermanfaat bagi banyak pihak.
4. Masyarakat Pulau Pisang lebih aktif menyuarakan keluhan mereka terhadap pengembangan daerahnya agar didengar oleh pemerintah terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
5. Masyarakat Pulau Pisang berusaha secara mandiri mencari investor untuk pembangunan galeri seni yang menampung kerajinan khas Pulau Pisang (kerajinan tapis).